

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA LEMBAK
TAHUN 1950-1984**

SKRIPSI

Oleh

Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM : 06041382126065

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA LEMBAK
TAHUN 1950-1984**

SKRIPSI

Oleh

Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM: 06041382126065

Program Studi Pendidikan Sejarah

Disetujui

Pembimbing



**Dr. Dedi Irwanto, M. A.
NIP. 197305252006041002**

Disahkan,

a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sriwijaya

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**Dr. Hudaidah, M.Pd.
NIP.197608202002122001**

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA LEMBAK
TAHUN 1950-1984**

SKRIPSI

Oleh

Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM: 06041382126065

Program Studi Pendidikan Sejarah

Mengesahkan:

Pembimbing,



Dr. Dedi Irwanto, M. A.

NIP. 197305252006041002

Mengetahui:

**Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,**



**Dr. Hudaidah, M.Pd.
NIP.197608202002122001**

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,**



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP.199202292019031013**



**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA LEMBAK
TAHUN 1950-1984**

SKRIPSI

Oleh

Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM: 06041382126065

Program Studi Pendidikan Sejarah

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

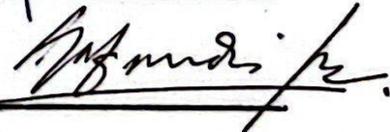
Tanggal : 25 Juli 2025

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Dedi Irwanto, M. A.

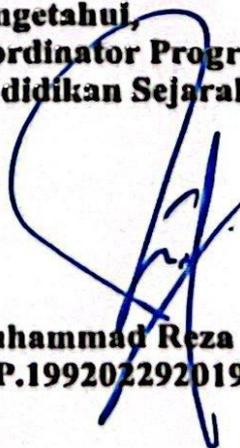


2. Anggota : Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D.



Palembang, 25 Juli 2025

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah**



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP.199202292019031013**

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA LEMBAK
TAHUN 1950-1984**

SKRIPSI

Oleh

Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM: 06041382126065

Program Studi Pendidikan Sejarah

**Disetujui untuk diajukan dalam ujian Akhir program sarjana
Pembimbing**



**Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002**

Mengetahui

Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292119031013**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM : 06041382126065

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Marga Lembak Tahun 1950-1984*” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau pegaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan pada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 25 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM. 06041382126065

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta limpahan rahmat yang begitu luas sehingga skripsi yang berjudul “Sejarah Perkembangan Marga Lembak Tahun 1950-1984” dapat diselesaikan dengan baik, insyaAllah. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Irwanto, M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi, masukan dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya, aamiin. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan FKIP UNSRI, Bapak Dr. Hartono, M.A., Ketua Jurusan Pendidikan IPS, Ibu Hudaidah, M.Pd., serta Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd., yang telah memudahkan pengurusan administrasi skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah membagikan ilmu selama masa studi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Dr. Syafrudin Yusuf, M.Pd., Ph.D., selaku penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini, ucapan terima kasih untuk Bapak dan Ibu seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Terakhir, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penulis baik secara materi, pikiran (gagasan), tenaga, perasaan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan dampak positif, menginspirasi pembaca, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tercinta.

Indralaya, 25 Juni 2025

Penulis

Endah Sulistia Oktasyawitri

NIM. 06041382126065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji dan segala syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan suatu karya yang bernama skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan selalu tercurahkan kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini akan penulis persembahkan terhadap manusia baik yang telah berperan di dalam kehidupan saya:

- ❖ Dengan rasa syukur yang mendalam dan cinta yang tulus skripsi ini kupersembahkan kepada: orang tuaku tercinta, Bapak Sukirman Hatta dan Ibu Yunani. My first teachers, my biggest supporters, and my endless source of strength, terima kasih yang tak terhingga atas setiap do'a yang tak pernah putus, peluh yang tak dihitung, dan kasih sayang yang tak terukur. Terima kasih bapak dan umak telah menjadi pelita dalam gelapku, tempat istirahat ketika lelahku, dan tempat berpulang ketika dunia terasa asing. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan kepada kalian, umur yang panjang, dan keberkahan atas setiap cinta dan pengorbanan kalian.
- ❖ Teruntuk adikku tersayang, Syantana fattria Yunansya, yang selalu hadir dengan tulus, menjadi tempat berbagi, tempat bercerita, dan menjadi penyemangat saat langkah terasa berat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang dan jalan hidup yang terbaik. Teruslah bermimpi dan gapai cita-citamu
- ❖ Teruntuk sepupu-sepupuku Puji, Ica, Arya, Irza dan Amel. Terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Untuk Puji terimakasih sudah memberikan tumpangan dan menemani selama mengerjakan Skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang setimpal. Karya ini adalah hasil kerja keras dan dukungan kalian yang tak ternilai.
- ❖ Kepada Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi saya, Bapak Dr. Dedi Irwanto, M.A., terima kasih sebesar-besarnya untuk semua motivasi, dukungan dan nasihat yang telah diberikan selama ini, untuk

semua ketulusan dan keikhlasan dalam meluangkan waktu membimbing serta mengarahkan saya untuk penulisan skripsi ini hingga akhir.

- ❖ Kepada dosen-dosen prodi Pendidikan Sejarah, Bapak Drs. Alian Sair, M.Hum., Bapak Dr. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D., Ibu Dr. L.R. Retno Susanti, M.Hum., Ibu Dr. Farida, M.Si., Ibu Dra. Sani Safitri, M.Si., Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd., Bapak Dr. Dedi Irwanto, S.S., M.A., Bapak Adhitya Rol Asmi, M.Pd., Ibu Aulia Novemy Dhita SBK, M.Pd., Bapak Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd., Bapak Yudi Pratama, M.Pd., Ibu Risa Marta Yati, M.Hum., Bapak Alif Bahtiar Pamulaan, M.Hum., Bapak Diki Tri Apriansyah Putra, M.Hum., Ibu Helen Susanti, M.A., dan Ibu Rani Oktapiani, M.Pd. Terima kasih telah memberikan ilmu-ilmunya selama masa perkuliahan, serta staf administrasi, Bapak Asep Syaifullah dan Bapak Agung Dwi Rizky yang telah membantu urusan akademik dengan baik.
- ❖ Teruntuk sahabat terbaik di bangku kuliah, keluarga besar Ketek: Puja Damayanti, Deliya Paramita, dan Meldianto. Terima kasih atas semua dukungan, tawa, dan kenangan yang telah kita ciptakan bersama selama masa kuliah ini. Setiap candaan yang tercipta ketika kumpul bersama membuat penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang seperti kalian. Terimakasih banyak atas segala bantuannya selama ini. Semoga kita semua sukses di jalan kita masing-masing di masa yang akan datang.
- ❖ Teruntuk teman seperjuangan skripsi: Vebiana Anugrah Rezni, yang dari awal menjadi teman dalam pengerjaan skripsi ini hingga skripsi ini selesai. Terimakasih banyak sudah menemanin bimbingan, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan semangat dan motivasi. Semoga kebaikan selalu mengiringi langkah-langkah kita selanjutnya dan sukses untuk kita.
- ❖ Teruntuk teman sekip dan sekitarnya: Sekar, Rafli, Sandi, tofel, diko. Terimakasih banyak atas bantuannya, tumpangannya selama penulis berada di Palembang. Semoga kebaikan kalian di balas dengan kebaikan pula.

- ❖ Teruntuk sahabat Turing (Turu Miring): Nova, Fika, Intan, Dilmi, Nada, Dwi. Terimakasih sudah menjadi tempat bercerita, berbagi canda dan tawa ketika pulang ke dusun. Terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian
- ❖ Terimakasih kepada teman-teman satu angkatan Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Sangat-sangat senang bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kalian, banyak kenangan yang tercipta selama masa perkuliahan yang akan selalu penulis ingat. Terimakasih banyak atas semuanya. Semoga kita semua sukses di masa yang akan datang.
- ❖ Teruntuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah
- ❖ Teruntuk teman-teman Kabinet Amerta Mandala, IMMETA Sumsel, KPU KM FKIP 2023. Terimakasih sudah menjadi tempat penulis belajar banyak hal, belajar bagaimana mengemban amanah, belajar menyelesaikan masalah, belajar arti kebersamaan, mengayomi satu sama lain.
- ❖ Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian skripsi ini mulai dari instansi hingga orang-orang baik yang penulis temukan selama penelitian.
- ❖ Almamater kebanggaanku – Universitas Sriwijaya.
- ❖ Terakhir terimakasih yang tak terhingga pada diri sendiri sudah bisa sampai di titik ini.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR PENDIDIKAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PRAKATA.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xivv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Marga Di Sumatera Selatan	10
2.1.1 Definisi Marga	10
2.1.2 Asal Usul Marga Lembak	11
2.2 Marga Lembak Pada Masa Kesultanan Palembang.....	12

2.3 Marga Lembak Pada Masa Kolonial Belanda.....	18
2.4 Marga Lembak Pada Masa Jepang.....	22
2.5 Marga Lembak Pada Masa Revolusi Fisik.....	24
2.6 Wilayah Marga Lembak Saat Ini	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Langkah-langkah Penelitian.....	33
3.2.1 Heuristik	33
3.2.2 Kritik Sumber.....	34
3.2.3 Interpretasi.....	37
3.2.4 Historiografi	37
3.3 Pendekatan	39
3.3.1 Pendekatan Politik.....	39
3.3.2 Pendekatan Ekonomi	39
3.3.3 Pendekatan Sosiologi dan Antropologi	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Sistem Pemerintahan Marga Lembak Pada Masa Orde Lama (1950-1966)...	42
4.1.1 Sistem Politik Marga Lembak Pada Masa Orde Lama (1950-1966).....	42
4.1.2 Sistem Ekonomi Marga Lembak Masa Pada Orde Lama (1950-1966) ...	48
4.1.3 Sistem Sosial Budaya Marga Lembak Pada Masa Orde Lama (1950-1966)	49
4.2 Sistem Pemerintahan Marga Lembak Pada Masa Orde Baru (1966-1983)....	52
4.2.1 Sistem Politik Marga Lembak Pada Masa Orde Baru (1966-1983).....	52
4.2.3 Sistem Ekonomi Marga Lembak Pada Masa Orde Baru (1966-1983).....	57
4.2.3 Sistem Sosial Budaya Marga Lembak Pada Masa Orde Baru (1966-1983)	58

4.3 Dampak Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga Lembak Pada Tahun 1984	59
4.3.1 Dampak Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga Lembak Terhadap Sistem Politik Pada Tahun 1984	59
4.3.2 Dampak Penghapusan Sistem Pemerintaha Marga Lembak Terhadap Sistem Ekonomi Pada Tahun 1984.....	64
4.3.3 Dampak Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga Lembak Terhadap Sistem Sosial Budaya Pada Tahun 1984.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
SIMPULAN DAN SARAN	66
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Marga-Marga Kewedanaan Lematang Ilir Kabupaten LIOT	25
Tabel 2.2 Marga-Marga Kewedanaan Lematang Ogan Tengah Kabupaten LIOT	26
Tabel 2.3 Daftar Nama Kepala Desa Lembak Tahun 1984-2025	62
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Lembak	28
Tabel 2.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lembak	28
Tabel 2.6 Daftar Nama Camat Lembak.....	31
Tabel 4.1 Daftar Nama Pejabat Marga Lembak dari tahun 1950-1967	47
Tabel 4.2 Daftar Wilayah Marga Lembak, Marga Alai dan Marga Kartamulya .	52
Tabel 4.3 Daftar Nama Pejabat Marga Lembak dari Tahun 1967-1982	56
Tabel 4.4 Daftar Nama Kepala Desa Lembak Tahun 1984-2025	56
Tabel 4.5 Perubahan Eks Dusun Marga Lembak Menjadi Desa.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Adjenin, <i>Pasirah</i> Marga Tahun 1954-1964.....	43
Gambar 4.2 H. Abdul Karim, <i>Pasirah</i> Marga Lembak Tahun 1950-1954 dan 1964-1967	44
Gambar 4.3 Gotong Royong Membangun Rumah.....	49
Gambar 4.4 Tradisi <i>Sedekah Viara</i>	50
Gambar 4.5 Tradisi <i>Marhaba</i>	51
Gambar 4.6 Masak Bersama.....	51
Gambar 4.7 B. Ademan, <i>Pasirah</i> Marga Lembak Tahun 1967-1982	53
Gambar 4.8 Surat Perintah Bupati LIOT Untuk Membentuk KPPS Tahun 197754	
Gambar 4.9 Koharun, <i>Pembarap</i> Sekaligus <i>Pasirah</i> Penganti	55
Gambar 4.10 Surat Pemungutan IPEDA Tahun 1976.....	57
Gambar 4.11 Kitab Al-Barzanji	58
Gambar 4.12 Latihan <i>Diker</i>	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Masa Hindia Belanda	21
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Marga Lembak	46
Bagan 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Lembak Setelah Sistem Marga Hapuskan	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan	73
Lampiran 2 Lembar Usul Judul.....	74
Lampiran 3 SK Pembimbing.....	75
Lampiran 4 SK Penelitian Kecamatan Lembak	77
Lampiran 5 SK Penelitian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	78
Lampiran 6 SK Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Muara Enim.....	80
Lampiran 8 Izin Penelitian Kecamatan Lembak	81
Lampiran 9 Kartu Bimbingan.....	82
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian	85

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Perkembangan Sejarah Marga Lembak Tahun 1950-1984" yang bertujuan untuk mengkaji perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Marga Lembak serta dampak penghapusan Marga Lembak selama kurun waktu 1950-1984. Penelitian ini menggunakan metode historis, meliputi langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik, ekonomi, sosial, dan antropologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marga Lembak diperintah oleh seorang pasirah yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, sistem tersebut juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk tradisi seperti marhaba, sedekah bedusun, dan gotong royong. Perubahan besar terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapus sistem marga dan menggantinya dengan pemerintahan berbasis desa. Hal ini menyebabkan terjadinya restrukturisasi kelembagaan, pergeseran peran pemimpin adat, dan hilangnya kewenangan lokal atas pengelolaan sumber daya. Meskipun demikian, beberapa tradisi dan nilai budaya masyarakat Lembak tetap dilestarikan melalui peran pemimpin adat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sejarah, Perkembangan, Marga, Lembak*

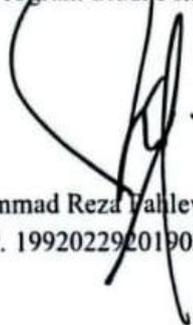
Pembimbing,



Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



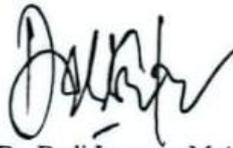
Muhammad Reza Wahlewi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013

ABSTRACT

This study is entitled "Historical Development of the Lembak Clan 1950-1984" which aims to examine the political, economic, and socio-cultural changes of the Lembak Clan community and the impact of the elimination of the Lembak Clan during the period 1950-1984. This study uses a historical method, including heuristic steps, source criticism, interpretation, and historiography. Data collection was carried out through literature review and interviews. This study uses a political, economic, social, and anthropological approach. The results of the study show that the Lembak Clan is ruled by a pasirah who holds executive, legislative, and judicial powers. In practice, this system also regulates the social, economic, and cultural life of the community, including traditions such as marhaba, sedekah bedusun, and gotong royong. Major changes occurred with the enactment of Law Number 5 of 1979 which abolished the clan system and replaced it with a village-based government. This led to institutional restructuring, a shift in the role of traditional leaders, and the loss of local authority over resource management. Nevertheless, some traditions and cultural values of the Lembak community are still preserved through the ongoing role of traditional leaders.

Keywords: *History, Development, Clan, Lembak*

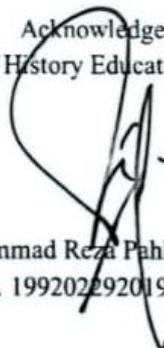
Advisor,



Dr. Dedi Irwanto, M.A
NIP. 197305252006041002

Acknowledged,

Coordinator of History Education Study Program



Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd
NIP. 199202292019031013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap suku dan bangsa di daerah-daerah di Indonesia memiliki sistem pemerintahan tradisional sendiri yang coraknya dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah mereka (Poltak Johansen *et al.*, 2012). Pemerintahan tradisional memiliki beragam bentuk yang berkembang di berbagai suku bangsa. Bentuk-bentuk pemerintahan ini memiliki kesamaan dengan sistem kekuasaan yang dikemukakan oleh *Max Weber*, di mana pemimpin memperoleh kekuasaan karena warisan yang diyakini dan dihormati oleh masyarakatnya. Salah satu tradisi pewarisan kekuasaan adalah melalui hubungan darah, baik melalui ikatan perkawinan *affinal* maupun keturunan langsung *consanguineal* (Hidayah dan Radiawan, 1993).

Beberapa daerah di Indonesia memiliki sistem pemerintahan tradisional seperti di Sumatera Barat yang dikenal dengan Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis memiliki batas wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, memiliki pemimpin secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat setempat (Putera, 2020). Berbeda dengan masyarakat Bali yang memiliki sistem pemerintahan tradisional dalam bidang pertanian yang unik bernama Subak (Manan & Galba, 1989). Subak memiliki dua fungsi yaitu internal dan eksternal, fungsi internal meliputi pencarian dan distribusi air irigasi, operasi dan pemeliharaan fasilitas irigasi, mobilisasi sumber daya, penanganan sengketa, dan kegiatan ritual. Fungsi eksternal Subak adalah sebagai agen pembangunan pertanian dan perdesaan, yang berperan penting dalam program-program pembangunan pertanian (Hadi, 2000).

Berbeda dengan sistem pemerintahan tradisional Nagari dan Subak, Sumatera Selatan memiliki sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan istilah Marga. Dahulunya Sumatera Selatan memiliki kesatuan masyarakat hukum yang berkembang berdasarkan garis keturunan yang menempati suatu wilayah tertentu (Irwanto *et al.*, 2022). Sumatera Selatan dulunya terbagi menjadi dua

wilayah yang dikenal dengan uluan dan iliran. Wilayah iliran identik dengan Ibukota Sumatera Selatan yaitu Palembang (Adytyas dan Fikri, 2023) sedangkan daerah uluan menurut *J.W Van Royen* dalam "*De Palembangse Marga*" daerah uluan bermula dari pegunungan yaitu Gunung Kaba dibagian utara, Gunung Dempo di bagian tengah, dan Gunung Seminung di bagian selatan yang merupakan bagian dari dataran tinggi Bukit Barisan di Uluan Palembang (Ismail, 2004). Daerah-daerah uluan dan iliran tersebutlah yang menjadi cikal bakal sistem pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan yang dikenal dengan istilah marga.

Kata "*Marga*" berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "*Varga*" yang memiliki makna sebuah wilayah tertentu yang juga sebagai sekumpulan rumpun atau keluarga (Istianda *et al.*, 2023). Di Sumatera Selatan marga merupakan gabungan dari dusun-dusun, baik atas garis keturunan maupun wilayah tertentu (Pemerintah Provinsi Daerah (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996). Secara politik, marga merupakan sistem pemerintahan Tradisional Sumatera Selatan yang di bentuk oleh Kesultanan Palembang kira-kira pada abad ke-18 sistem ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Kolonial Belanda, Jepang, dan Indonesia sebelum berlakunya UU No.7 tahun 1979 (Irwanto *et al.*, 2022).

Pada masa Kesultanan Palembang pemerintahan marga di bagi menjadi tiga wilayah pertama wilayah *Kepungutan*, yang di mana wilayah ini dibebankan pajak oleh sultan karena wilayah ini memiliki sumber daya alam yang memadai. Kedua wilayah *Sikap*, pada wilayah ini masyarakatnya mempunyai tugas yang khusus dari sultan yaitu seperti tukang kayuh perahu sultan, tukang kayu dan berbagai keahlian lainnya. Ketiga wilayah *Sindang*, wilayah ini pada umumnya berbatasan dengan wilayah kesultanan, wilayah ini diberikan tugas oleh sultan untuk menjaga perbatasan dari gangguan yang ada di luar (Herman, 2021). Marga Lembak masuk ke dalam wilayah *Sikap* yang diberi tugas oleh sultan sebagai tukang kayuh perahu sultan, tukang kayu kesultanan dan berbagai keahlian lainnya (Ismail, 2004).

Sistem pemerintahan marga di Kesultanan Palembang pada masa itu bertujuan untuk mempermudah dalam pengaturan wilayah di Kesultanan Palembang (Apriyanti, E., & Dienaputra, 2015) dan juga tidak terlepas dari tujuan ekonomi dan politik kesultanan (Irwanto *et al.*, 2022). Kesultanan Palembang

berakhir setelah Kolonial Belanda yang berhasil memenangkan peperangan melawan Kesultanan Palembang pada tahun 1821 (Susilo & Sarkowi, 2020). Kemudian tahun 1825 kesultanan dihapuskan oleh Belanda (Wargadalem, 2023).

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga marga memperoleh kewenangan secara tidak langsung dalam menjalankan fungsi politik, pemerintahan, dan peradilan di lingkungan internal masyarakat marganya. Marga memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara-perkara adat serta menarik pajak dari warga marga. Sementara itu, untuk persoalan yang melibatkan hubungan antarmarga dalam ranah pemerintahan dan politik, penyelesaiannya berada di bawah kewenangan *kontroleur*, yakni pejabat kolonial Belanda yang memiliki otoritas tertinggi di atas struktur pemerintahan marga (Istianda *et al.*, 2023).

Pada tahun 1870 pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan buku *Regeering Almanak* menyebutkan bahwa wilayah Keresidenan Palembang awalnya terdapat sembilan *afdeeling*, yang kemudian pada tahun 1872 berubah menjadi tujuh *afdeeling*, pada tahun 1878 berubah lagi menjadi enam *afdeeling*, dan pada berdasarkan *Staatblad* 1918 Nomor 612 *afdeeling* diubah lagi menjadi empat *afdeeling* (Baharuddin, 2019).

Kemudian perubahan ini terus berlanjut hingga tahun 1921, melalui *Staatblad* nomor 465 dan tahun 1930 melalui *Staatblad* nomor 352, Keresidenan Palembang berubah lagi menjadi tiga *afdeeling* yang terdiri dari *Afdeeling* Palembang Ilir, *Afdeeling* Palembang Ulu dan *Afdeeling* Ogan dan Komering Ulu. *Afdeeling* Ogan dan Komering Ulu yang tepatnya dalam wilayah *Onder Afdeeling* Ogan Ilir dengan ibu Kota Tanjung Raja dan memiliki sekitar sembilan belas marga di antaranya salah satunya Marga Lembak (Ismail, 2004). Pemerintahan Marga Lembak terdiri dari sebelas dusun dan berbatasan langsung dengan Marga Alai dan Kartamulya (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

Kolonial Belanda berakhir setelah Jepang melakukan serangan tanggal 14 Februari 1942. Pelabuhan udara Talang Betutu, merupakan sasaran pertama yang harus Jepang dalam mengalahkan tentara Belanda di Keresidenan Palembang. pada tanggal 25 Februari 1942 telah keluar segala aturan-aturan tentang pelaksanaan pemerintahan di Palembang dan sekitarnya. Pembubaran sistem badan

legislatif seperti *groepsgemeenschap* Palembang, dewan marga, serta penghapusan struktur *afdeeling* menandai berakhirnya bentuk-bentuk kelembagaan tersebut. Meskipun demikian, penghapusan dewan tidak sepenuhnya menghilangkan prinsip otonomi dalam pemerintahan. Otonomi tetap dijalankan, meskipun tanpa dukungan badan atau perangkat khusus yang secara formal menyelenggarakan fungsi otonomi tersebut. Seluruh kewenangan dan kekuasaan yang sebelumnya berada pada dewan marga maupun struktur dusun, kemudian terpusat langsung di bawah kendali kepala marga, yakni *Pasirah* atau *kerio* (Irwanto *et al.*, 2010).

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan Pemerintah Indonesia membagi wilayah menjadi delapan provinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Daerah Provinsi di bagi menjadi beberapa Keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

Pada 15 Mei 1946 di bentuk sub-Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bawah Provinsi Sumatera, yang terdiri dari Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, dan Keresidenan Bangka Belitung. Pada tanggal 20 November 1946 Keresidenan Palembang membentuk LIOT (Lematang Ilir Ogan Tengah) yang saat ini dikenal dengan sebutan Kabupaten Muara Enim. LIOT terbagi menjadi dua kewedanaan yaitu Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah. Marga Lembak yang sebelumnya masuk ke dalam *Onder Afdeeling* Ogan Ilir setelah pembentukan LIOT yang terdiri dari dua kewedanaan Marga Lembak Masuk ke dalam Kewedanaan Lematang Ogan Tengah berdasarkan keputusan rapat dewan Keresidenan Palembang 20 November 1946 (Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2024).

Pada Tahun 1948 pemerintah berupaya menyeragamkan pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang tata kelola masing-masing daerah setingkat seperti kota, negeri, marga dan istilah lainnya adalah desa. Namun Undang-Undang ini belum dapat dilaksanakan di karena Indonesia masih dalam perang kemerdekaan. Setelah adanya pengakuan kedaulatan di keluarkan lagi Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya dan di lengkapi dengan Undang-Undang No. 19

Tahun 1965 tentang Desapraja yang pada akhirnya pelaksanaannya juga di tunda tapi sudah ada upaya pemberhentian kepala marga dan para jajarannya (Ismail, 2004).

Pemerintah kembali menetapkan kebijakan tentang dasar pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menegaskan asas desentralisasi dan menetapkan adanya wilayah otonomi yang disebut sebagai desa. Pembentukan suatu desa didasarkan pada kriteria tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, serta peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Pelaksanaan pemerintahan desa berada langsung di bawah koordinasi camat melalui struktur pemerintahan tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut pada tanggal 24 Maret 1983, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983. Melalui keputusan tersebut, ditetapkan beberapa poin penting, antara lain penghapusan sistem marga, pembubaran perangkat marga secara hormat, serta perubahan struktur dusun eks-marga menjadi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Irwanto *et al*, 2010).

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian tentang marga atau *Pasirah* sebagai kepala marga yang telah lebih dahulu ditulis. Penelitian pertama dari Heru Herman dengan judul “Pemerintahan Marga Sanga Desa Tahun 1906-1950 (Sumbangan Materi Mata Kuliah Sejarah Politik)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Marga Sanga Desa telah eksis sejak masa Kesultanan. Pada periode pemerintahan kolonial, wilayah ini sempat mengalami perubahan administratif, yakni dari *Onderafdeeling Moesi Oeloe* menjadi *Onderafdeeling Moesi Ilir*. Selain itu, pada rentang tahun 1912 hingga 1930, Marga Sanga Desa berada di bawah kewenangan pemerintahan *Onderdistrict Babat*. Selama masa pendudukan militer Jepang, struktur pemerintahan yang menaungi Marga Sanga Desa tetap menyerupai sistem pada masa Karesidenan, meskipun dengan perubahan nomenklatur. Memasuki masa kemerdekaan, Marga Sanga Desa menjadi bagian dari wilayah administratif Kewedanan Moesi Ilir dalam lingkup pemerintahan Negara Sumatera Selatan.

Penelitian kedua berjudul "Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983". Penelitian dilakukan oleh Mareta Adelia, Yunani Hasan dan Alian Sair pada tahun 2019. Penelitian yang membahas tentang perubahan sistem Fungsi internal meliputi pencarian dan distribusi air irigasi, operasi dan pemeliharaan fasilitas irigasi, mobilisasi sumber daya, penanganan sengketa, dan kegiatan ritual. Fungsi eksternal Subak adalah sebagai agen pembangunan pertanian dan perdesaan, yang berperan penting dalam program-program pembangunan pertanian.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Arenda Rosyada dengan judul "Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950–1983". Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa sistem pemerintahan Marga Tanjung Batu mulai menunjukkan perkembangan sejak tahun 1855, pasca runtuhnya Kesultanan Palembang. Pada masa tersebut, struktur pemerintahan telah tertata dengan adanya pemimpin resmi yang disebut Depati, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah *mancang*, yang memiliki kesetaraan makna dengan pemilihan umum. Dalam kurun waktu kolonial antara tahun 1855 hingga 1950, Marga Tanjung Batu tercatat telah memiliki 12 *Pasirah*. Kemudian, pada periode 1970 hingga 1984, marga ini mengalami perkembangan administratif dengan hadirnya enam camat di wilayah Kecamatan Tanjung Batu dan tiga *pasirah* yang menjalankan pemerintahan secara berdampingan.

Dari ketiga penelitian diatas mengkaji mengenai sejarah maupun sistem pemerintahan marga yang berkembang di Sumatera Selatan. Peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai sejarah marga yang berkembang di daerah asal penulis, yakni Lembak, Kabupaten Muara Enim. Penelitian tentang Marga Lembak, Kabupaten Muara Enim masih sangat minim bahkan belum ada yang meneliti tentang Marga Lembak. Berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh peneliti, kurang pedulinya masyarakat terhadap sejarah lokal yang ada di daerah Marga Lembak sehingga yang mengetahui tentang Marga Lembak hanya orang-orang yang hidup di pada masa marga dan keturunan dari mantan pejabat marga yang mengetahuinya. Terbatasnya sumber dan kurangnya publikasi tentang Marga

Lembak seperti arsip dan dokumentasi marga membuat orang tidak banyak mengetahui tentang adanya Marga Lembak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sejarah Perkembangan Marga Lembak Tahun 1950-1984”**. Dengan harapan penulis bisa memberikan pengetahuan kepada pembaca dan menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Marga Lembak memiliki sejarah yang panjang dalam hal pemerintahan marga, sehingga penting untuk melakukan penelitian mengenai Marga Lembak ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuatlah rumusan masalah yang akan diteliti. Maka rumusan masalah dalam penelitian tentang “Sejarah Perkembangan Marga Lembak 1950-1984” adalah.

1. Bagaimana sistem pemerintahan Marga Lembak pada masa Orde Lama (1950-1966)?
2. Bagaimana sistem pemerintahan Marga Lembak pada Masa Orde Baru (1966-1983)?
3. Bagaimana dampak penghapusan sistem pemerintahan Marga Lembak pada tahun 1984?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang diteliti di atas, peneliti bermaksud untuk memberikan penjelasan dan pengungkapan tentang “Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950-1984” Maka peneliti akan berupaya menjelaskan dan mengungkapkan tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Marga Lembak pada masa Orde Lama (1950-1966).
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Marga Lembak pada masa Orde Baru (1966-1983).
3. Untuk mengetahui dampak penghapusan sistem pemerintahan Marga Lembak pada tahun 1984.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian menjadi lebih terarah serta tidak terlalu jauh dan menyebar dengan apa yang akan di bahas oleh peneliti, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dikaji, maka di buatlah skup kajian yang meliputi:

a. Skup Tematikal

Skup tematikal berfungsi untuk membatasi tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tema dalam penulisan ini adalah Sejarah Perkembangan Marga Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 1950-1984.

b. Skup Spasial

Skup spasial merupakan pembatasan wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini penulis membatasi wilayah yang akan ditulis dan menjadi objek penelitian yaitu wilayah Marga Lembak yang sekarang menjadi Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Alasan pengambilan batas spasial ini karena Kecamatan Lembak sebelumnya berbentuk pemerintahan marga namun berubah ke pemerintahan desa setelah adanya perubahan Undang-Undang dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983.

c. Skup Temporal

Skup temporal merupakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi atau berlangsung. Pembatasan waktu dalam penelitian ini yaitu mulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1984. Pembahasan yang dimuat dalam penelitian ini melihat pada tahun 1950 sistem pemerintahan masih berbentuk pemerintahan marga dan pada tahun 1984 pemerintahan marga dihapuskan maka beralih ke pemerintahan desa, setelah adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan. Sehingga penelitian lebih mudah dan terbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai perkembangan pemerintahan Marga Lembak dalam kurun waktu 1950-1984.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dan sebagai bahan masukan dalam mengkaji sejarah lokal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi adat istiadat bagi Pemerintah Desa Lembak.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Yass, M. 2004. Metodologi Sejarah dan Historiografi. Diktat Fakultas
- Adhuri, D. (2000). Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Antropologi Indonesia*.
- Adytyas, N. O., & Fikri, M. S. (2022). Tradisi Politik Melayu: Analisis Sistem Marga Uluan Dan Iliran Di Sumatera Selatan. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 22(2), 133-145.
- Alian, A. (2012). Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah (Criksetra)*, 2(2).
- Apriyanti, E., & Dienaputra, R. D. (2015). Pemerintahan Marga di Lubuklinggau Tahun 1855-1983. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 7(2), 233-248.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (26 September 2024). Kecamatan Lembak Dalam Angka 2024. Diakses pada 19 Mei 2025, dari <https://muaraenimkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/b30df62c0b1055b257b68f27/kecamatan-lembak-dalam-angka-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (26 September 2024). Kecamatan Lembak Dalam Angka 2013. Diakses pada 15 Mei 2025, dari <https://muaraenimkab.bps.go.id/id/publication/2013/10/28/bd9cafe08334a7d419af1377/lembak-dalam-angka-2013.html>.
- Bado, B. (2022). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah.
- Baharuddin, T. (2019). Studi Kemungkinan Desa Kembali Menjadi Komunitas Mandiri. Non.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metode penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai permasalahan kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Budiarjo, Miriam. (1978). Dasar-Dasar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Darmanto, Weningsih, S., & Istianda, M. (2014). Nilai-Nilai Pemerintahan Marga Sebagai Basis Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Timur. *Research Symposium*, 8(9), 962–979.
- Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim. (2023). Laporan Akhir Revisi Naska Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim).
- Eviany, E. (2019). Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya: Bandung: Cendekia Press.
- Hadi, A. P. (2002). Eksistensi desa adat dan kelembagaan lokal: Kasus Bali. *Jurnal: Yayasan Agribisnis Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hasan, Y, Alian & Adelia, M. 2019. Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983. Criksetra: *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 8(1): 17-35.
- Herman, H. (2021). *Pemerintahan Marga Sanga Desa Tahun 1906-1950*. Universitas Sriwijaya.
- Hidayah, Z., & Radiawan, H. (1993). Sistem pemerintahan tradisional daerah Sumatra Selatan. Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Hidayat, A., Yani, S. Z. F., & Rahmi, Y. A. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7). 7091-7099.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., & Lolang, E. (2023). Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irwanto, D, Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. (Yogyakarta: Eja Publishers).
- Irwanto, D. (2022). *Naska Akademik rancangan Peraturan Daerah Tentang Marga*. Pusat Kajian Sumatra Selatan (Puskass).
- Irwanto, D. (2024). Sejarah dan Perkembangan Adat Istiadat Perkawinan Marga Danau, Pedamaran. Aksara Pena.
- Irwanto, D. dan A. S. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.

- Ismail, M. A. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya (Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan)*. Unanti Press Palembang.
- Istianda, M., Irwanto, D., & G. (2023). *Jalan Kembali Ke sistem Marga di Sumatera Selatan*. Aksara Pena.
- Johansen, P., Donatinaus, D., Yohanes, Y., Mantir, A. F., & Nahan, A. F. (2012). Kepemimpinan tradisional pada masyarakat Dayak Ngaju provinsi Kalimantan Tengah. STAIN Pontianak Press.
- Khoiruddin, M. A. (2014). Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam. Tribakti: *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 348-361.
- Manan, F. N., & Galba, S. (1989). Sistem subak di Bali. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Meileni, H., Apriyanti, D., & Choirudin, C. (2018). Implementasi Mobile Gis Pemetaan Objek Wisata Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Fifo*, 10(1), 99-104.
- Muslimin, A. (1989). Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- Nurismawati, D. (2020). Eksistensi Kesenian Jathilan Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa Unit V Sungai Bahar 1990-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Sumatera Selatan*.
- Pemkab_muaraenim. (2024). *Daftar Marga di Kabupaten Muara Enim (Keresidenan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1946)*. <https://www.instagram.com/p/DCfaijhBHdZ/?igsh=OGRsMGg5dmw1emp0>. di akses pada 4 febuari 2025.
- Putera, N. W. (2020). Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Rahmatullah, D., & Zaini, M. (2021). Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 346-364.
- Santun, D. I. M., Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang*. Eja Publisher.
- Simbolon, M. M. (2025). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).
- Sukmana, W. J. (2021). Metode penelitian sejarah. *Seri publikasi pembelajaran*, 1(2), 1-4.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2020). Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 10(1), 48–66.
- Tarigan, U. (2004). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Diakses dari JDIHN pada Kamis, 25 Juli 2025.
- Wahidi, R. (2015). Budaya dan Agama sebagai Identitas Islam Nusantara; Kajian atas Tradisi Marhaba'an/Maulid Nabi di Tanah Sunda. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(2), 200-218.
- Wargadalem, F. R. (2023). Perbudakan dan Konflik di Kesultanan Palembang. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1623-1631.
- Waruwu, A. S., & Silalahi, M. (2020). Peran Camat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan Onohazumba Nias Selatan. *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), 11-20.
- Weber, M. (2009). *Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winata, L., & Purwaningsih, S. M. (2017). Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 728-737.